

ABSTRAK

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Tujuan pengalihan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD, memperbaiki struktur APBD, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Pengalihan hak pengelolaan PBB-P2 paling lambat dilakukan 1 Januari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesesuaian pengelolaan dan perlakuan akuntansi atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Kediri dengan standar yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan teknik observasi, teknik dokumentasi, dan teknik wawancara.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan PBB-P2 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri secara umum sudah sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan PBB-P2 meskipun ada kekurangan dalam regulasi SOP, SDM dan Peralatan Pemetaan. Perlakuan Akuntansi atas PBB-P2 dilakukan sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP No.71 Tahun 2010 dengan memakai basis kas menuju akrual. Dari hasil penelitian tersebut sebaiknya Pemerintah Kabupaten Kediri menambah pegawai tenaga penilai dan *Operator Consule*, membuat bidang khusus dalam mengelola PBB-P2 serta penambahan sistem akuntansi yang memadai guna pengelolaan dan perlakuan akuntansi untuk PBB-P2 menjadi lebih baik di tahun mendatang.

Kata kunci : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Daerah, Pengelolaan, Perlakuan Akuntansi, Pendapatan PBB-P2

ABSTRACT

Under UU No.28 of 2009, *Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2)* was transferred from the central government to local government. Transfer of *Rural and Urban Land and Building tax* is expected to increase PAD, improve the structure of the APBD, improve services to the public and improve transparency and accountability in its management. The transfer of management rights the *PBB-P2* later than January 1, 2014. This study aimed to identify and analyze the suitability of management and accounting treatment of *Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2)* as a local tax in Kediri Regency government with the applicable standards. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques used in the form of library research and field research by observation techniques, documentation techniques, and interview techniques.

Research results show that management of *PBB-P2* undertaken by the Government of Kediri Regency in general are in accordance with the General Guidelines for the Management of the *PBB-P2* despite shortage in regulation of SOP, human resource and mapping equipment. Accounting Treatment of *PBB-P2* conducted in accordance with Governmental Accounting Standards in PP No.71 of 2010 with cash toward accrual basis. From these results should Kediri Regency government to create custom fields to manage the *PBB-P2* and adding regulatory of IT Management, employees of assessors (appraiser) and operator Consule, and mapping equipment as well as the addition of an accounting system that is adequate to the management and accounting treatment for the *PBB-P2* would be better in the coming years.

Keywords: *Rural and Urban Land and Building Tax, Local Taxes, Management, Accounting Treatment, Revenue of PBB-P2*